**BAB VI**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Akuntabilitas administrasi perencanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan**

Dilihat dari dimensi perencanaan strategis menunjukkan bahwa Dinas Dikpora belum melaksanakannya secara akuntabel yaitu tidak mengikutsertakan unit-unit organisasi dalam pembuatan Rencana Strategis serta tidak mengakomodir kebutuhan pada 17 kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dan tidak melibatkan kepala-kepala sekolah selaku ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan banyak menemukan hambatan.

1. **Akuntabilitas administrasi pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan**

Dari dimensi akuntabilitas administrasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun hubungan hierarkhis yang jelas antara pusat pertanggungjawaban dari unit-unit organisasi telah dilaksanakan dalam bentuk kordinasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang masih belum sesuai. Pada dimensi akuntabilitas politik masih didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu khususnya dalam pengangkatan jabatan kepala sekolah. Dimensi akuntabilitas legal pihak Dinas Dikpora belum melaksanakan peraturan yang berlaku sebagaimana yang diharapkan. Pada dimensi akuntabilitas professional penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan secara efektif, dibuktikan dengan hasil UKG tahun 2012 serta tahun 2015 belum mencapai standar yang ditetapkan pemerintah. Dan pada dimensi akuntabilitas moral belum menunjukkan kualitas moral sebagaimana seharusnya.

330

1. **Akuntabilitas administrasi pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan**

Dilihat dari dimensi pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal belum berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

1. **Faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan**

Dari dimensi komunikasi belum berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, dimensi sumberdaya kurang mendukung dari sisi kompetensi (pendidikan dan pengalaman) serta sumberdaya lainnya. Dimensi disposisi belum menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari implementor untuk mengimplementasikan kebijakan secara baik dan benar. Sementara pada dimensi struktur birokrasi, ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pendelegasian tugas.

1. **Saran**

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan-temuan penelitian dan berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut ini disampaikan saran-saran penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Dikpora Kabupaten Minahasa Selatan, agar senantiasa melibatkan unit-unit organisasi yang ada dalam pembuatan rencana strategis sehingga mendukung pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang menunjang prinsip-prinsip akuntabilitas.
2. Agar Dinas Dikpora dapat lebih meningkatkan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensinya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan menengah kejuruan yang akuntabel di Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menindaklanjuti implementasi kebijakan pemerintah khususnya Permendiknas No 12 Tahun 2007, PP no 74 tahun 2008 dan Permenpan-RB no 21 tahun 2010, sebaiknya membuat *Job Analysis* dan *Human Resources Planning* dalam menetapkan pengawas satuan pendidikan, serta menempatkan posisi Dewan Pendidikan sebagai pihak yang seharusnya mengadakan pengawasan eksternal sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Bagi Pimpinan SKPD Dinas Dikpora Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan tupoksinya, serta meningkatkan kemampuan sistem informasi kepada seluruh *stakeholders* dengan memperhatikan elemen komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.